



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 24438-24448

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Strategi Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran APBD pada Kecamatan Tirtomoyo Periode 2023 -2024

Herditya Surya Kusuma, Achmad Choerudin, Darsono

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

herdityasurya92@gmail.com, achmadchoerudin77@yahoo.co.id, darsono6434@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi dan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta merumuskan strategi peningkatan pengelolaan anggaran pada Kecamatan Tirtomoyo periode 2023–2024. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Camat, bendahara, staf keuangan, serta pihak terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan dokumen pelaksanaan program. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Kecamatan Tirtomoyo tergolong efisien. Rasio realisasi belanja terhadap target anggaran sebesar 83,69% pada 2023 dan 84,44% pada 2024, sehingga keduanya berada di bawah 100%. Pelaksanaan program juga dinilai efektif karena sebagian besar target fisik terealisasi 100%, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target akibat mutasi pegawai dan kondisi kendaraan dinas yang tidak layak. Strategi peningkatan efisiensi dan efektivitas mencakup penguatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, perencanaan dan penganggaran berbasis target, inventarisasi aset, kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan APBD yang terencana, akuntabel, dan berbasis kinerja dapat mendukung kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Kata kunci : Strategi, Efisiensi, Efektivitas, Anggaran Belanja Daerah

1. Latar Belakang

Salah satu bagian terpenting dalam melaksanakan suatu rencana atau program adalah anggaran. Penting untuk merencanakan program dengan cermat sebelum melaksanakannya sehingga dapat mencapai tujuannya. Menurut Dilliana, S. M., & Henrikus, H. (2022), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam merencanakan dan mengelola keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang efisien, penyusunan APBD harus memperhatikan peran kunci yang dimainkan oleh anggaran kas. Seperti yang dikemukakan Darnawati, Tri Wijaya Putra, Muhammad Taufiq (2024) Bagian perencanaan harus memastikan bahwa keseluruhan proses pembuatan APBD dapat menunjukkan semaksimal mungkin tentang bagaimana keputusan diambil mengenai arah kebijakan umum, skala prioritas, serta alokasi dan distribusi sumber daya. Penelitian Resky Dwianty (2021:534) menemukan bahwa kegunaan dan efisiensi penggunaan anggaran dipengaruhi oleh seberapa baik pemerintah daerah menangani uangnya.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik keberhasilan finansial suatu daerah, maka semakin baik pula penggunaan dana dan belanjanya. Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas secara umum didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau entitas kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Di era sekarang masyarakat tidak hanya ingin mengetahui berapa banyak uang yang dibelanjakan, tetapi juga apa hasil yang telah dicapai dari pengeluaran tersebut. misalnya, peningkatan pelayanan perizinan yang lebih cepat, dan kegiatan pemberdayaan yang berhasil.

Di era otonomi daerah saat ini, setiap unit pemerintahan dituntut untuk tidak hanya melaksanakan pembangunan, tetapi juga mempertanggungjawabkan setiap rupiah dana publik yang telah dipercayakan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara telah menjadi tuntutan fundamental dari masyarakat,

yang semakin sadar akan haknya untuk mengetahui dan mengawasi bagaimana sumber daya publik dikelola. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofyani & Tahar (2021) yang dilakukan di tingkat pemerintah, menunjukkan bahwa transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat meskipun sifatnya sementara karena transparansi perlu dioptimalkan melalui pemberian informasi dan akses mengenai program dan pengelolaan dana kepada masyarakat. Dengan ini, maka perlu adanya kesadaran bagi setiap entitas pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah, untuk mengelola anggaran secara efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofyani & Tahar (2021) yang dilakukan di tingkat pemerintah, menunjukkan bahwa transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat meskipun sifatnya sementara karena transparansi perlu dioptimalkan melalui pemberian informasi dan akses mengenai program dan pengelolaan dana kepada masyarakat. Dengan ini, maka perlu adanya kesadaran bagi setiap entitas pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah, untuk mengelola anggaran secara efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Realisasi Anggaran Belanja merupakan proses pelaksanaan anggaran dalam program atau kegiatan nyata yang telah direncanakan dan ditetapkan (Oktaviani & Mulyandani, 2022). Anggaran memiliki peran penting dalam operasional organisasi bisnis maupun Lembaga pemerintah, dan menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan di dalamnya. Dengan adanya anggaran yang efektif, kinerja organisasi dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih optimal. Dengan kata lain, Jika anggaran dikelola secara efektif dan efisien, maka capaian target kinerja akan tercapai (Dwifarchan & Sulistiyanti, 2023).

Kecamatan Tirtomoyo selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana. dan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Kecamatan Tirtomoyo dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

Pada Kecamatan Tirtomoyo terkait dengan penggunaan anggaran APBD Kecamatan Tirtomoyo periode 2023-2024, terdapat segmen permasalahan manajemen yaitu : Kurangnya jumlah pegawai yang kompeten di bidangnya dan masih banyak aparatur kecamatan yang belum sepenuhnya menguasai sistem administrasi berbasis aplikasi. Jumlah Pegawai di Kecamatan Tirtomoyo adalah 16 orang ASN, 4 orang PPPK, dan 7 orang pegawai honorer. Dengan 5 orang staf baik ASN maupun PPPK tidak menguasai Alat Komputer sepenuhnya, sehingga terkadang butuh bantuan dari pegawai honorer, Birokrasi yang kurang optimal dalam pelayanan dan kurangnya informasi yang jelas mengenai alur pelayanan, Beberapa dokumen dan waktu pencatatan aset (BAST) yang telat dilaporkan dan kurang transparan menjadi menghambat laporan keuangan daerah.

Selain permasalahan segmen diatas, terdapat riset (research gap) pada peneliti terdahulu yaitu Fathurrahman (2023), Asse et al (2023), Drajat et al (2023), E.Lasupu (2023) mengatakan bahwa terdapat strategi dengan mendorong peningkatan perekonomian, tata kelola kegiatan yang efisien dan efektivitas APBD di beberapa OPD Kabupaten/Kota. Hal ini merujuk bahwa perlu diadakannya penelitian yang lebih kompleks dengan melihat faktor efisiensi dan efektivitas pada Kecamatan Tirtomoyo, dikarenakan a). Adanya penurunan anggaran pada tahun berikutnya sehingga memaksa kecamatan melakukan efisiensi anggaran yang ketat. b). Tirtomoyo merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, sehingga diperlukan untuk mengukur seberapa efektif koordinasi antara pihak kecamatan, BPBD, dan masyarakat dalam menangani bencana di tengah keterbatasan anggaran operasional. c). Tirtomoyo berada dalam masa transisi perencanaan jangka panjang yang baru dengan Bupati Wonogiri yang baru. Penelitian diperlukan untuk memastikan manajemen kecamatan mampu menerjemahkan visi dan misi kabupaten ke dalam program kerja tahunan yang terukur.

2. Metode Penelitian

2.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan dengan objek laporan keuangan pemerintah Kecamatan Tirtomoyo sehingga tempat penelitian akan dilakukan di Kecamatan Tirtomoyo yang terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Lebih spesifiknya lokasi yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah kantor Kecamatan Tirtomoyo sebagai pusat administrasi dan pengelolaan keuangan, dimana laporan

keuangan disusun dan dikelola serta sebagai lokasi untuk wawancara pejabat terkait. Data yang dianalisis berkaitan dengan periode tahun 2023–2024.

Adapun pelaksanaan penelitian (Persiapan Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Penyusunan Laporan Penelitian) dilaksanakan mulai September- Januari 2026.

2.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, bentuk penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam proses, persepsi, dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, di mana data berupa kata-kata dan makna. M. Sobry Sutikno, Prosmala Hadi (2020) Saputra menjelaskan penelitian kualitatif sebagai salah satu metodologi dalam penelitian belum memiliki definisi yang baku dan disepakati penggunaannya secara umum. Kendati demikian, definisinya dapat disimpulkan lebih komprehensif-integratif melalui penelusuran definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, sehingga membentuk sebuah definisi yang utuh di antaranya:

1. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut: “Qualitative research is a type of educational research in which the researcher relies on the views of participants; asks broad, general questions; collects data consisting largely of words (or text) from participants; describes and analyzes these words for themes; and conduct the inquiry in a subjective, biased manner.” Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian pendidikan di mana peneliti bergantung pada pandangan partisipan atau informan
2. Bongdan dan Taylor dalam Moleong menyatakan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati.
3. Kirk dan Miller dalam Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.
4. Strauss dan Corbin mendefinisikan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

2.3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata bukan angka (Harahap, 2020). Selanjutnya menurut Arikunto (2020:127) Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh.

1. Data Primer adalah Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan informan kunci di Kecamatan Tirtomoyo
2. Data Sekunder adalah Data laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)) Kecamatan Tirtomoyo untuk periode [Tahun Awal] sampai [Tahun Akhir].

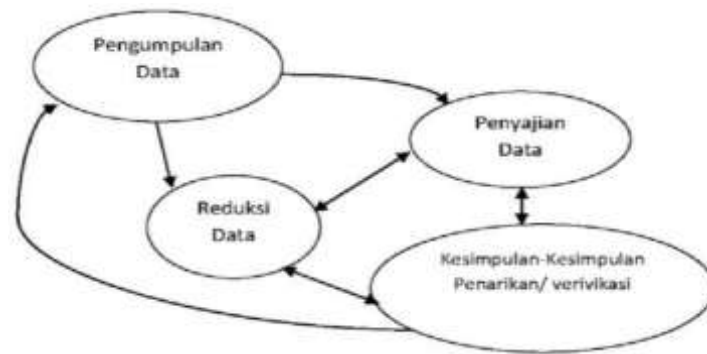
2.4. Teknik Pengambilan Data

1. Wawancara : Wawancara dalam penelitian ini dilakukan sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara Tidak Terstruktur (Unstructured Interview)
2. Analisis dokumen : Teknik analisis dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk meninjau dokumen resmi seperti laporan keuangan, rencana kerja anggaran, dan kebijakan internal yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan kebijakan internal yang terkait dengan pengelolaan keuangan.

2.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Teknik ini dipopulerkan oleh tokoh Miles dan Huberman. Menurut kedua ahli tersebut, teknik analisis interaktif dibagi menjadi empat tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data (Data Reduction), sajian data (Data Display), dan penarikan simpulan (Conclusion Drawing).

Gambar 2.1 Model analisis interaktif Miles & Huberman



1. **Pengumpulan Data**
Langkah pertama dalam teknik analisis data adalah pengumpulan data. Pada langkah ini peneliti melakukan pembentukan uraian terperinci. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan merekamnya.
2. **Reduksi Data (Data Reduction)**
Pada langkah ini peneliti melakukan reduksi data dengan cara menyeleksi, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan lapangan. Tujuannya adalah membuang data yang tidak relevan dan menonjolkan data yang penting untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini terjadi terus-menerus selama penelitian berlangsung.
3. **Sajian Data (Data Display)**
Pada langkah ini, peneliti menyusun informasi atau data secara teratur dan terperinci sehingga dapat dengan mudah dipahami
4. **Penarikan Simpul (Conclusion Drawing)**
Pada langkah ini peneliti membuat simpulan dari data yang diperoleh sejak awal penelitian. Simpulan masih bersifat sementara dan perlu adanya verifikasi selama penelitian berlangsung.

2.6. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini menguraikan tahapan operasional yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Tahapan ini dirancang secara sistematis untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian kualitatif.

1. **Tahap persiapan**
Pertama, peneliti melakukan prapenelitian untuk mendapatkan gambaran tentang objek penelitian. Kemudian, mengajukan judul dan membuat proposal
2. **Tahap analisis**
Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan peneliti dan kemudian menganalisisnya
3. **Tahap akhir**
Pada tahap terakhir peneliti menulis simpulan akhir dari seluruh analisis yang telah dilakukan dan terakhir, menyusun laporan penelitian

3. Hasil dan Diskusi

A. LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Laporan Keuangan Daerah (LKD) dapat memberikan gambaran kuantitatif tentang "apa" yang telah terjadi dalam pengelolaan keuangan Namun, LKD tidak selalu menjelaskan "mengapa" suatu angka tercapai, "bagaimana" prosesnya berjalan, atau "apakah" hasil tersebut benar-benar efektif dan efisien dari sudut pandang operasional. Penyerapan Anggaran Belanja Kecamatan Tirtomoyo selama dua tahun berturut-turut yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa	Persen
2023	4.471.583.596	3.742.223.876	729.359.720	83,69
2024	4.795.772.096	4.049.697.711	746.074.385	84,44

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi anggaran belanja Kantor Kecamatan Tirtomoyo tahun 2023-2024 dikatakan fluktuatif dimana dalam dua tahun berturut-turut mengalami kenaikan dan dana yang dikeluarkan hampir semua terealisasi.

B. EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi tersendiri cara pemanfaatan sumber daya tanpa mengurangi kualitas. Penerapan prinsip Efisiensi sangat memudahkan instansi pemerintah seperti yang diterapkan oleh Kantor Kecamatan Tirtomoyo karena bisa menggunakan anggaran yang ada dengan efisien untuk menghasilkan efektivitas yang ingin dicapai. Efisiensi adalah ukuran keberhasilan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan (syam:2020).

- Bagaimana mengukur dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan di kantor Kecamatan Tirtomoyo. Camat Tirtomoyo, Camat Tirtomoyo, Suyatno, S.Ip., M.M. menjelaskan :
“Realita di Kecamatan Tirtomoyo dengan personil yang terbatas dan tuntutan pekerjaan yang selalu ada. Saya memanfaatkan jumlah personil dan membagi beberapa program untuk diselesaikan dengan tim-tim kecil. Mengukur juga tidak formal, kami mengukur seberapa banyak program yang dapat dilaksanakan dengan jumlah pegawai yang terbatas”
- Bagaimana pengelolaan sumber daya di Kantor Kecamatan Tirtomoyo berkontribusi dalam mencapai anggaran yang efisien? Camat Tirtomoyo, Suyatno, S.Ip., M.M. menjawab :
“Dengan memanfaatkan jumlah personil yang terbatas, Bapak Camat Tirtomoyo membagi-bagi tim tim kecil untuk menjalankan program kerja itu efisien karena kita dapat menghabiskan anggaran dengan melaksanakan program kerja dengan personil yang terbatas.”
- Apakah efisiensi di Kantor Kecamatan Tirtomoyo sudah dinyatakan berhasil pada beberapa tahun ini? Camat Tirtomoyo, Suyatno, S.Ip., M.M. menjawab:
“Dengan melihat laporan keuangan pertahunnya saya rasa sudah melaksanakan efisiensi dengan baik dan saya mengharapkan tingkat efisien anggaran di Kecamatan Tirtomoyo ini semakin baik.”

Selain itu peneliti juga melakukan pengujian dengan mengacu pada laporan APBD sehingga apakah Kantor Kecamatan Tirtomoyo telah melaksanakan prinsip efisiensi. Berikut perhitungannya :

Tabel. 3.1 Rumus Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
Di atas 100 %	Tidak Efisien
Kurang Dari 100%	Efisien

Tabel 3.3 Perhitungan Efisiensi

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Target Anggaran Belanja	Sisa Anggaran	Efisiensi	Kategori
2023	3.742.223.876,00	4.471.583.596,00	729.359.720,00	83,69	Efisien
2024	4.049.697.711,00	4.795.772.096,00	746.074.385,00	84,44	Efisien

Berdasarkan tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Tirtomoyo secara perhitungan kuantitatif dengan menggunakan Laporan APBD dapat dikatakan efisiensi dengan peningkatan efisiensi sebesar 0,75 dari tahun 2023 ke 2024. Karena pada Tahun 2023 mendapatkan hasil 83,69% dan pada tahun 2024 mendapatkan hasil 84,44% yang dimana dalam klasifikasi pengukuran efisien termasuk dalam persentase kurang dari 100% sehingga dikatakan efisien.

C. EFEKTIVITAS ANGGARAN

D.

Efektivitas anggaran adalah ukuran keberhasilan pemerintah atau organisasi dalam mencapai target kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap rencana anggaran dalam satu tahun. Semakin tinggi tingkat realisasi mendekati target yang direncanakan, semakin efektif anggaran tersebut.

Tabel 3.4.

FORMAT REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD KAB.WONOGIRI

Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Fisik							
	Target 2024		Realisasi 2024		Target 2023	Realisasi 2023		
			jumlah	%		jumlah	%	
BELANJA LANGSUNG SKPD	100	Persen	100	Persen	100,00	100	100	100,00
KECAMATAN TIRTOMOYO	100	Persen	100	Persen	100,00	100	100	100,00
KECAMATAN	100	Persen	100	Persen	100,00	100	100	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	Persen	100	Persen	100,00	100	100	100,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	100,00	100	100	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	100,00	100	100	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26	Orang/bulan	16	Orang/bulan	61,54	19 orang/bulan	19 orang/bulan	100,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14	Laporan	14	Laporan	100,00	14 Laporan	14 Laporan	100,00

Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Fisik					
	Target 2024	Realisasi 2024		Target 2023	Realisasi 2023	
		jumlah	%		jumlah	%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Persen	100,00	100%	100	Persen
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	5 Dokumen	5 Dokumen	100,0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100,00	100	Persen	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	1 Paket	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	1 Paket	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	1 Paket	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	1 Paket	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100,00	100	Persen	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	24 Laporan	100,00	24 Laporan	24 Laporan	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 Laporan	36 Laporan	100,00	36 Laporan	36 Laporan	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100,00	100	Persen	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	5 Unit	83,33	4 Unit	4 Unit	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit	100,00	4 Unit	4 Unit	100
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	100,00	2 Unit	2 Unit	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	100 Persen	100,00	100	Persen	100
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100,00	100	Persen	100

Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Fisik						
	Target 2024	Realisasi 2024		Target 2023	Realisasi 2023		
		jumlah	%		jumlah	%	
			100,00	5 Dokumen	5 Dokumen	100	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100,00	100	Persen	100	100,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100,00	100	Persen	100	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	100,00	3 Laporan	3 Laporan	100,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 Persen	100 Persen	100,00	100	Persen	100	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	100 Persen	100,00	100	Persen	100	100,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga	12 Lembaga	100,00	12 Lembaga	12 Lembaga	100	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100,00	100	Persen	100,00	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit	4 Unit	100,00	4 Unit	4 unit	100	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas	8 Pokmas	100,00	17 Pokmas/Ormas	17 Pokmas/ormas	100	
Evaluasi Kelurahan	24 Laporan	24 Laporan	100,00	2 Laporan	2 Laporan	100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen	100 Persen	100	100	Persen	100	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	100,00	100	Persen	100	
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100 Orang	100,00	100 orang	100 orang	100	
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 dokumen	2 dokumen	100	

Program,Kegiatan, Sub Kegiatan			Fisik							
			Target 2024		Realisasi 2024		Target 2023	Realisasi 2023		
					jumlah	%		jumlah	%	
Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan	Tugas Pimpinan	Forum di	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12 dokumen	12 dokumen	100,00

Berdasarkan Tabel 3.4 data di atas, dapat disimpulkan bahwa Kantor Kecamatan Tirtomoyo capaian kinerja tiap program dan kegiatan sangat tinggi. Dikarenakan semua capaian kinerja dapat dilaksanakan secara maksimal. Meskipun ada dua program di Tahun 2024. Meskipun ada dua program di Tahun 2024 yaitu Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dimana tidak mencapai angka 100%. Kasubag Perencanaan Keuangan menjawab :

“Memang benar di kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak mencapai target dikarenakan ada nya pegawai yang mutasi di awal tahun atau pun di pertengahan tahun sehingga mengurangi penyerapan kinerja. Untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah dikarenakan pada pertengahan tahun ada kendaraan dinas yang memang sudah tidak layak dan harus di laporkan untuk dilelang.”

Untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi dikemudian hari,

1. Dalam menyusun dokumen perencanaan, Rencana Kerja (Renja), dan pagu indikatif yang tepat sasaran.
2. Memperbaiki sistem pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi.
3. Menginventaris aset : pemeliharaan peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud (yang masih layak digunakan atau pun tidak).
4. Memastikan setiap barang milik daerah yang dipelihara tercatat dan berfungsi maksimal.

E. STRATEGI EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN

Meskipun pada dasarnya LRA sering dijadikan dasar pengambilan keputusan dan penilaian kinerja keuangan masing-masing PPTK. Sehingga proses penyusunan Laporan keuangan Daerah di kecamatan dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan oleh Instansi terkait dan diharapkan selesai pada waktu yang ditentukan. Terkait pihak yang terlibat diantaranya adalah camat, PPK, PPTK dan bendahara. Sedangkan tantangan yang ditemukan biasanya berupa masalah waktu penyelesaian laporan. (Sekretaris Camat).

Selanjutnya, proses perencanaan anggaran di Kecamatan Tirtomoyo merujuk pada RPJMD Kabupaten dan rencana strategis yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan dua cara utama, yakni musyawarah dengan masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan dan arahan dari pemerintah kabupaten. Partisipasi masyarakat diakomodir dalam Musrenbang, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

“Tantangan utama dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD) di tingkat kecamatan berpusat pada faktor waktu dan koordinasi teknis. Tekanan untuk menyajikan data belanja yang detail sering kali berbenturan dengan ritme kegiatan operasional di lapangan dan adanya hambatan koordinasi antara Camat, PPK, PPTK, dan Bendahara dalam mengumpulkan dokumen pendukung belanja secara cepat dan akurat.” (Camat Tirtomoyo)

1) Faktor-faktor Strategis yang mempengaruhi penyerapan anggaran Pemerintahan Kecamatan Tirtomoyo

A. Faktor Internal

a) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketersediaan SDM yang kompeten dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan sangat krusial. Ini sejalan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti kompetensi SDM dan sistem akuntansi (Henindraningrum & Yuhertiana, 2021).

b) Sistem Pengelolaan Keuangan (Teknologi Informasi)

Penggunaan Sistem Pengelolaan Keuangan yang digunakan secara resmi oleh pemerintah daerah di Indonesia saat ini adalah SIPD-RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia). Sistem ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

c) **Perencanaan dan Penganggaran yang Matang**

Menetapkan target output dan outcome yang jelas sejak awal, hal ini biasa dilaksanakan di Kecamatan Tirtomoyo pada triwulan III tahun berjalan. Sehingga pada triwulan IV sudah bisa memastikan outcome yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya, dan memastikan setiap Rupiah memiliki tujuan yang terukur.

B. Faktor Eksternal

a) **Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah (Kabupaten)**

Beberapa kebijakan pemerintah daerah diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Regulasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk tahun anggaran 2024.

b) **Partisipasi dan Kepercayaan Masyarakat**

Kantor Kecamatan Tirtomoyo tidak hanya memperhatikan penyerapan secara nominal tetapi juga menggunakan pendekatan kepada masyarakat untuk memastikan anggaran menjawab kebutuhan riil warga. Selain Musrenbang desa/kelurahan dan juga Musrenbang Kecamatan pada setiap tahunnya, Kecamatan Tirtomoyo juga menggelar forum khusus untuk kelompok rentan (perempuan, anak, dan disabilitas).

c) **Mekanisme Pengawasan Eksternal**

Mekanisme pengawasan eksternal terhadap laporan keuangan Kecamatan Tirtomoyo dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adanya audit eksternal oleh BPK atau Inspektorat bahwa pimpinan kecamatan tidak hanya bertanggung jawab secara internal ke atasan (Bupati), tetapi juga secara eksternal kepada hukum dan masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kualitatif yang mendalam dengan dukungan data kuantitatif, beberapa kesimpulan kunci dapat ditarik: Pertama, Kecamatan Tirtomoyo sudah menerapkan efisiensi dengan berusaha untuk melakukan penghematan anggaran yang dilakukan dengan keterbatasan personil untuk menjalankan program-program yang sudah dibagi dalam tim-tim kecil. Melalui perhitungan rasio efisiensi dalam kurun waktu 2023-2024 didapat hasil kurang dari 100% yang menandakan bahwa penggunaan anggaran belanja sudah efisien dengan adanya penghematan anggaran belanja. Kedua, Kecamatan Tirtomoyo tidak berfokus pada pendapatan sehingga efektivitas dapat dilihat dari tercapainya target yang ditetapkan. Hasil dari penelitian memberikan informasi bahwa anggaran dan kegiatan yang ditargetkan dalam satu tahun dapat hampir semua tercapai dengan 100%. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan dalam satu tahun berjalan di Kantor Kecamatan Tirtomoyo penggunaan anggaran sudah dilaksanakan secara efektif dengan tercapainya target yang ditetapkan. Ketiga, rekomendasi strategis untuk peningkatan Kecamatan Tirtomoyo mencakup peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi peran teknologi informasi (integrasi data dan aksesibilitas), Perencanaan dan Penganggaran yang Matang, Melakukan strategi efisiensi anggaran, Melaksanakan Komitmen dan Kepemimpinan, Mengikuti dan memahami Regulasi Dan Kebijakan Pemerintah Daerah (Kabupaten), peningkatan transparansi dan partisipasi publik, melakukan pengawasan eksternal, dan melakukan Peningkatan Efisiensi Belanja dan Penyaluran Dana yang Tepat Waktu.

Referensi

1. Cahyani, D. D., Amalia, G. S., Putri, J. A., & Zahira, A. A. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Efisien Dan Efektivitas Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Periode 2020-2023: Jakarta
2. Darise, R. I. (2023). The Effect of Economic Growth and Income Inequality on Poverty in Central Sulawesi Province Period 2011-2022. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(5), 1331-1342.
3. Dilliana, S. M., & Henrikus, H. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara

4. Drajat Armono (2020) Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020 : Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
5. Edtiyarsih, D. D., & Izzabillah, N. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura*
6. Efriandi, Kurnia, R., Putra, R. Y., & Syukria, A. (2022). Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Imam Bonjol Padang: Maqdis: *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* (Volume 7, No. 2)
7. E.Lasupu, Erika Z (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo UnaUna : *Jurnal EMBA (Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi)* Volume 9, Nomor 3, Juli 2021.
8. Fathurahman. (2023). Strategi Penyerapan Anggaran yang Partisipatif dan Kolaboratif dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah: *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Volume 22, No. 2, Desember 2023).
9. Lasupu, E. Z., Kalangi, L., & Mawikere, L. M. (2021). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kulu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 565–575
10. Mikesell, J. L. (2021). *Fiscal Administration: Analysis and Applications for the Public Sector*
11. Nasrum, N., Iek, M., & Ngutra, R. N. (2024). Analysis of the Efficiency and Effectiveness of the Budget for the DPR's Aspirational Funds. *Dynamics of Politics and Democracy*
12. Sutikno, M. S. (2020). Penelitian kualitatif. *Holistic*
13. Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS.
14. Syam, S. (2020). Pengaruh efektifitas dan efisiensi kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 46–55.